

Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi Lampung

Alpina Aprilia^{1✉}, Neli Aida², Heru Wahyudi³, Asih Murwiati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Lampung

alpinaaprilia.aa@gmail.com

Abstract

Currently, Indonesia's labour force is still experiencing an imbalance, where the number of people entering the labour market continues to increase, while there are not enough jobs to accommodate them. The second highest micro-scale industry labour force in Sumatra Island is Lampung Province. Lampung Province has the second lowest average minimum wage in Sumatra Island over the last 5 years. This is not in line with the high number of micro-scale industrial labour owned by Lampung Province. The research is quantitative using panel data. Data is obtained from the Central Bureau of Statistics with time series data 2018-2022 and cross-section data of cities / districts in Lampung Province. Human Development Index (HDI) has a positive and significant effect on minimum wages. This means that if the Human Development Index increases, the minimum wage will also increase. Economic growth has a negative and significant effect on minimum wages. The HDI has a large positive impact on the minimum wage, which means that an increase in the HDI will result in an increase in the minimum wage as well. On the other hand, economic growth has a significant negative impact on the minimum wage, meaning that an increase in economic growth will lead to a decrease in the minimum wage. Overall, both the HDI and economic growth together affect the minimum wage. The results of the R² Determination Coefficient Test found that 89% of the dependent variable can be explained by the independent variable with a statistical model, while 11% is explained by factors outside the model.

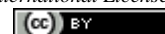
Keywords: Minimum Wage, Human Development Index, Economic Growth, Panel Data, Lampung.

Abstrak

Saat ini, ketenagakerjaan di Indonesia masih mengalami ketidakseimbangan, di mana jumlah orang yang masuk ke pasar kerja terus meningkat, sementara lapangan pekerjaan yang disediakan tidak cukup untuk menampung para tenaga tersebut. Tenaga kerja industri skala mikro tertinggi kedua di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ialah provinsi yang mempunyai rata-rata upah minimum kedua terendah di Pulau Sumatera selama 5 tahun terakhir. Hal ini tidak sejalan dengan tingginya jumlah tenaga kerja industri skala mikro yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan data panel. Data diperoleh bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan data time series 2018-2022 dan data CrossSection Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum. Artinya jika IPM meningkat maka upah minimum akan meningkat juga. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum. IPM berdampak positif besar terhadap upah minimum, yang berarti peningkatan dalam IPM akan mengakibatkan peningkatan upah minimum juga. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif signifikan terhadap upah minimum, artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan upah minimum. Secara keseluruhan, baik ipm maupun pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama memengaruhi upah minimum. Hasil Uji Koefisien Determinasi R² didapati bahwa variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas dengan model statistik sebesar 89%, sedangkan 11% dijelaskan oleh faktor diluar model penelitian ini.

Kata kunci: Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Data Panel, Lampung.

Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peningkatan kesejahteraan dan pemerataan bagi penduduknya. Kesejahteraan merupakan hak bagi semua orang, termasuk tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan karena salah satu faktor penting dalam proses produksi guna meningkatkan hasil produksi adalah tenaga kerja [1]. Saat ini, ketenagakerjaan di Indonesia masih mengalami ketidakseimbangan, di mana jumlah orang yang masuk

ke pasar kerja terus meningkat, sementara lapangan pekerjaan yang disediakan tidak cukup untuk menampung para tenaga tersebut [2].

Indonesia sebagai negara berkembang biasa disebut negara kepulauan dikarenakan terdiri dari banyak pulau-pulau, salah satu pulau adalah Pulau Sumatera yang memiliki jumlah provinsi terbanyak yaitu 10 provinsi [3]. Kemudian Pulau Sumatera juga merupakan pulau dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk pada pulau ini mencapai angka 8.5 juta jiwa di

Sumatera Selatan. Dikarenakan pulau ini laju pertumbuhan penduduknya tinggi maka jumlah tenaga kerja di pulau ini juga terus meningkat pada setiap tahunnya [4]. Berikut data jumlah tenaga kerja industri skala mikro Pulau Sumatera tahun 2020-2022 :

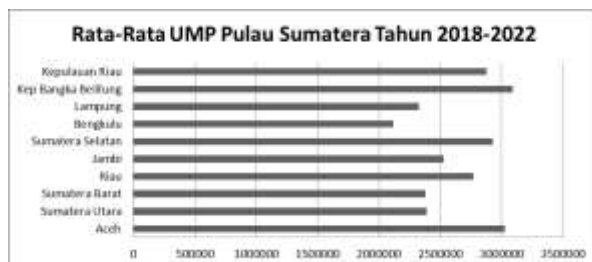
Tabel. Jumlah Tenaga Kerja Industri Skala Mikro Pulau Sumatera Tahun 2020-2022 (Orang)

Provinsi	2020	2021	2022
Aceh	159.683	180.314	174.367
Sumatera utara	200.851	233.331	214.261
Sumatera barat	155.646	167.048	141.852
Riau	93.07	88.301	83.523
Jambi	42.643	51.657	61.813
Sumatera selatan	134.62	141.794	136.34
Bengkulu	37.621	40.937	34.88
Lampung	166.382	168.992	163.665
Kep. Bangka Belitung	35.638	32.019	33.966
Kep. Riau	22.074	29.3	25.474

Berdasarkan tabel 1 diatas, menurut Badan Pusat Statistik dalam 3 tahun terakhir Provinsi Sumatera Utara ialah provinsi yang memiliki jumlah tenaga kerja industri tertinggi di Pulau Sumatera. Selanjutnya tenaga kerja industri tertinggi kedua di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung. Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 berisikan bahwa “Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun, sering kali pengusaha memberikan upah kepada pekerja terlalu rendah karena upah bagi perusahaan merupakan beban biaya produksi. Maka dari itu, Pemerintah merumuskan kebijakan upah minimum untuk melindungi hak pekerja [5]. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai upah minimum yang bertujuan untuk menciptakan standar penghasilan yang mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang layak bagi pekerja [6].

Di Indonesia, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berbeda di pada tiap-tiap provinsi baik memperhatikan kebutuhan hidup layak serta produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi pada provinsi tersebut [1]. Berikut merupakan rata-rata UMP Pulau Sumatera tahun 2018-2022 :

Tabel 2 Rata-Rata Upah Minimum Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Berdasarkan tabel 2 dapat kita lihat bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi yang rata-rata UMP-nya kedua terendah sepulau Sumatera selama 5 tahun terakhir. Hal ini tidak sejalan dengan tingginya jumlah tenaga kerja industri skala mikro yang dimiliki oleh Provinsi Lampung.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah faktor penting dalam menentukan tingkat upah minimum. UNDP mengembangkan IPM sebagai indikator guna mengukur kemajuan pembangunan serta kesejahteraan suatu negara. IPM juga mencerminkan tingkat kualitas tenaga kerja dalam hal keterampilan dan kemampuan. Menurut prinsip upah yang ideal, upah yang layak akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dan jumlah produksi yang dihasilkan [7].

Pembangunan manusia tidak dapat terjadi tanpa pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi menjamin pendapatan dan produktivitas yang lebih tinggi melalui pembukaan lapangan kerja baru. Tingginya tingkat pembangunan manusia akan berdampak pada kemampuan masyarakat, sehingga berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi [8]. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi akan berdampak pada kemampuan penduduk, sehingga berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi [9]. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB, PDRB ialah nilai total barang serta jasa yang diproduksi oleh warga negara serta warga negara asing dalam suatu negara selama periode waktu yang telah diketahui [10]. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi ialah indikator penting yang harus dipantau dalam konteks perekonomian suatu negara [11]. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah, lembaga, dan instansi terkait dalam mencapai tujuan ekonomi mereka. Sehingga, setiap negara akan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya [9].

Output tenaga kerja dapat direpresentasikan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pekerjaan dan besarnya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana besar penawaran tenaga kerja. Oleh karena itu, penetapan upah yang sesuai bisa dipertimbangkan dengan memperhatikan tingkat penawaran tenaga kerja, dikarenakan upah dapat dihitung dengan membandingkan penawaran tenaga kerja yang ada [7].

Penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan seperti penelitian ini dilakukan oleh Brilliant Primadila (2022) mengemukakan hasil bahwa variabel IPM menjelaskan bahwa ditemukannya pengaruh positif terhadap penetapan upah minimum di Kota Banjarmasin. Sedangkan pada variabel Pertumbuhan Ekonomi menjelaskan bahwa tidak ditemukannya pengaruh

terhadap penetapan upah minimum di Kota Banjarmasin [7]. Kemudian penelitian oleh Daniel Collyn Damanik (2021) menyatakan variabel indeks pembangunan manusia dan PDRB berpengaruh positif serta signifikan terhadap UMK Kota Pematangsiantar [2]. Selanjutnya penelitian oleh Adham Malay Japany (2022) menghasilkan variabel PDRB dan IPM berpengaruh positif terhadap upah minimum pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 [1].

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian pengaruh indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum di Provinsi Lampung tahun 2018-2022 baik itu secara parsial (uji t) maupun simultan (uji f).

2. Landasan Teori

Teori Upah Efisiensi

Dalam konteks ekonomi ketenagakerjaan, upah efisiensi merujuk pada tingkat upah yang diberikan kepada pekerja di atas standar upah minimum sebagai insentif untuk mempertahankan pekerja yang terampil dan efisien. Teori upah efisiensi mengusulkan bahwa majikan harus membayar upah yang cukup tinggi kepada pekerja agar mereka termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan pekerja yang berketerampilan tinggi tetap bertahan. Upah efisiensi juga dapat diberikan kepada pekerja di sektor-sektor yang memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi, seperti industri logam mulia, perhiasan, atau keuangan, untuk memastikan loyalitas mereka [12].

Teori Human Capital

Menurut penjelasan dari Naphat Wuttaphan pada tahun 2017, teori *human capital* berupaya untuk menginterpretasi fenomena tersebut melalui lensa ekonomi. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya berinvestasi dalam modal manusia. Keunggulan kompetitif dan kelangsungan bisnis dalam lingkungan bisnis yang kompleks diyakini akan diperoleh melalui investasi ini. Teori human capital mengacu pada pengukuran modal manusia yang mencakup berbagai aspek manusia dan dampaknya terhadap pengembangan sumber daya manusia [13].

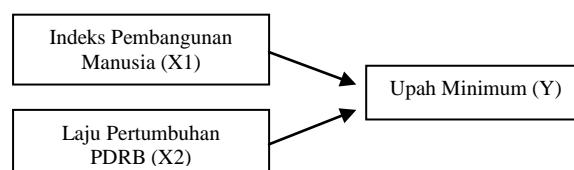
Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom klasik mengemukakan adanya 4 faktor yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni jumlah penduduk, kapitalisasi stok barang modal, luas lahan dan SDA, serta teknologi yang diterapkan [14]. Berdasarkan teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditingkatkan ketika para pengusaha mampu membuat inovasi baru dan menggabungkan elemen baru dalam proses produksi serta investasi bisnis. Dampak dari investasi ini adalah meningkatnya pendapatan nasional sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, suatu kapasitas produksi para pengusaha akan ikut meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya investasi baru mereka [15].

3. Metodologi Penelitian

Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan data panel. Data diperoleh bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan data *time series* 2018-2022 dan data *CrossSection* Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung. Untuk variabel menggunakan variabel bebas (X1) IPM Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung 2018-2022 dalam bentuk persen dan (X2) Laju Pertumbuhan PDRB Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung 2018-2022 dalam bentuk persen. Sedangkan Variabel terikat (Y) Upah Minimum Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung 2018-2022 dengan bentuk satuan rupiah. Berdasarkan kajian teoritis menunjukkan hubungan antar variabel, maka dikembangkan kerangka pemikiran seperti dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Atas dasar ilustrasi kerangka pemikiran diatas yang telah digambarkan, maka penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

1. IPM berpengaruh positif terhadap upah minimum.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap upah minimum.
3. IPM dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap upah minimum.

Teknik analisis menggunakan teknik analisis regresi data panel yang persamaannya sebagai berikut :

$$\text{LnUMKit} = \alpha + \beta_1 \text{IPMit} + \beta_2 \text{PDRBit} + e_{it}$$

Keterangan :

LnUMK = Upah Minimum (Rupiah)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Persen)

i = Cross Section

t = Time Series

α = Konstanta

β_{12} = Koefisien Regresi

e = Error Term

Dalam melakukan regresi data panel adanya 3 model yang dapat dipilih yaitu CEM, FEM, dan REM. Dalam memilih model yang terbaik, ada dua pengujian yaitu :

- Uji *Chow* dilakukan dengan bertujuan memilih model paling terbaik diantara model CEM atau model FEM
- Uji *Hausman* dilakukan dengan bertujuan memilih model paling terbaik diantara model FEM atau model REM

Sebelum melakukan regresi, sebelumnya akan dilakukan Uji asumsi klasik berupa uji normalitas dilakukan guna melihat apakah dalam penelitian ini data variabel yang akan digunakan telah terdistribusi normal. Selanjutnya uji Multikolinearitas yaitu uji guna melihat mengetahui pada regresi terdapat adanya korelasi dalam model regresi. Kemudian Uji Heterokedastitas yaitu untuk melihat ketidaksamaan varian error semua pengamatan variabel independent dalam model regresi [16]. Selanjutnya untuk uji hipotesis menggunakan Uji Statistik.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Uji kriteria pemilihan model

Uji *chow*

Apabila H_0 diterima, maka model CEM akan dipilih sebagai model terbaik, dan begitupun sebaliknya apabila H_1 diterima, maka model FEM akan dipilih sebagai model terbaik. Adapun pengambilan keputusan adalah berdasarkan nilai prob(p) untuk *Cross Section F*, jika $p > 0,05$ model terbaik yang dipilih ialah CEM, sedangkan jika $p < 0,05$ model terbaik yang terpilih ialah FEM. Kemudian dilanjutkan ke *Hausman Test* [17]. Hasil uji *chow* di dalam penelitian ini ada pada tabel berikut :

Tabel 3 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	24.180897	(14,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	144.173637	14	0.0000

Dilihat dari tabel diatas maka kita ketahui hasil uji *chow* sebesar nilai prob(p) adalah $0,0000 < 0,05$. Model terbaik yang terpilih ialah FEM. Sehingga akan dilakukan uji *hausman*.

Uji *hausman*

Apabila H_0 diterima, maka model REM ialah model terbaik yang dipilih, dan apabila H_1 diterima, maka model FEM ialah model yang dipilih. Ketentuannya yaitu dengan nilai prob(p) *Cross Section Random*, jika $p > 0,05$ model terbaik yang terpilih ialah model REM, sedangkan jika $p < 0,05$ model yang terpilih ialah model FEM. Hasil uji *hausman* di dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	207.131776	2	0.0000

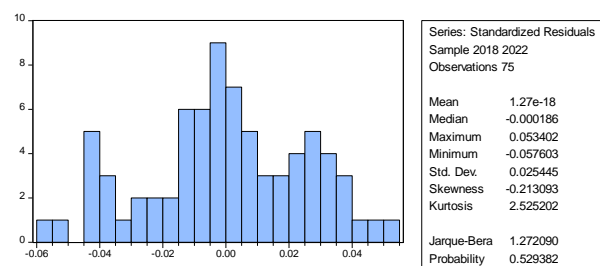
Dilihat dari table uji *hausman* diatas, maka diketahui jika nilai prob(p) adalah $0,0000 < 0,05$. Maka model paling baik yang digunakan dalam penelitian ini ialah model FEM.

b. Uji asumsi klasik

Uji normalitas

Guna dapat menilai apakah data pada variabel penelitian didistribusikan secara normal atau tidak terdistribusi normal, maka dilakukan pengujian normalitas [9]. Berikut ialah hasil dari uji normalitas :

Gambar 2 Uji Normalitas



Pada gambar 2 Jarque-Bera yang memberikan nilai probabilitas sebesar $0,529382 > 0,05$ (α) maka dapat diketahui kesimpulannya ialah data penelitian ini telah didistribusikan normal.

Uji multikolinearitas

Guna menentukan apakah ada korelasi antara variabel independen yang digunakan pada suatu model regresi, dilakukan pengujian multikolinieritas. Model regresi optimal adalah yang memiliki variabel independen yang tidak saling berkorelasi [9]. Hasil uji multikolonieritas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.021346
X2	0.021346	1.000000

Adapun pengambilan keputusan adalah dilihat dari nilai korelasi setiap variabel. Apabila nilai $> 0,80$ maka tak ada masalah multikolinearitas antar variabel. Hasil uji didapati nilai diantara variabel bebas $< 0,80$. Maka tak terjadi masalah multikolinearitas diantara variabel-variabel dalam model.

Uji heteroskedastisitas

Untuk mengidentifikasi keberagaman varian pada variabel gangguan, dilakukan pengujian heteroskedastisitas. Model regresi yang optimal ialah yang homogen dalam varian, atau dengan kata lain tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas [9]. Pengambilan keputusan jika menunjukkan nilai setiap variabel independen $< 0,80$ maka tak terjadi masalah

heteroskedastitas. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.336869	0.594614	0.566533	0.5732
X1	-0.004279	0.008639	-0.495308	0.6223
X2	0.003444	0.001842	1.869938	0.0665

Dilihat dari tabel diatas bahwa diketahui probabilitas tiap variabel < 0.05. Sehingga diambil kesimpulan bahwa data penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Statistik

Uji T

Dalam bagian ini akan diuji pengaruh antar variabel secara tersendiri dan bersama-sama, dengan menggunakan FEM [16]. Hasil dari uji t pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 7. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.953441	0.435684	18.25508	0.0000
X1	0.098446	0.006330	15.55328	0.0000
X2	-0.011548	0.001349	-8.558059	0.0000

Dari hasil regresi didapati bahwa IPM memiliki probabilitas $0,0000 < 0,05$ dan nilai koefisiennya 0,098446 yang berarti IPM berpengaruh positif signifikan terhadap upah minimum. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi didapati probabilitas $0,0000 < 0,05$ dan nilai koefisiennya -0,011548 yang memberikan arti bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengaruh negatif serta signifikan terhadap upah minimum.

Uji F dan Koefisien Determinasi R^2

Menurut (Ghozali, 2018) koefisien determinasi (R^2) adalah indikator yang dapat mengetahui kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat. Uji f dilakukan guna mengetahui pengaruh tiap variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat [18]. Ini ialah hasil dari uji f dan koefisien R^2 :

Tabel 8. Uji F dan R^2

R-squared	0.892910
Adjusted R-squared	0.863367
S.E. of regression	0.028741
Sum squared resid	0.047910
Log likelihood	169.4264
F-statistic	30.22490
Prob(F-statistic)	0.000000

Dilihat dari hasil uji diatas, didapati nilai Probabilitas F Statistik adalah $0,000000 < 0,05$. Secara bersamaan variabel bebas memberikan pengaruh signifikan kepada variabel terikat. Kemudian dari hasil diatas didapati nilai R^2 adalah 0,892910 yang berarti 89% variabel terikat dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas dengan model statistik, sebanyak 11% dijelaskan oleh faktor diluar model.

Pembahasan

a. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum

Dilihat dari hasil analisis regresi, disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif serta signifikan antara IPM dan upah minimum. Memberikan arti bahwa peningkatan ipm akan menyebabkan peningkatan juga dalam upah minimum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adham Malay Japany (2022) menemukan bahwa IPM memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap UMK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 [1]. Dan juga sejalan dengan penelitian Daniel Collyn Damanik (2021), menemukan bahwa IPM mempunyai pengaruh positif terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar [2].

b. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum

Dari analisis regresi, disimpulkan bahwa ada hubungan yang negatif serta signifikan diantara pertumbuhan ekonomi dengan upah minimum. Ini berarti bahwa kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan penurunan dalam upah minimum. Penelitian ini serupa dengan penelitian Nurul Anisa Putri (2022) upah minimum dalam jangka pendek dan panjang mempunyai suatu pengaruh yang negative serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia [19]. Dan juga sejalan dengan penelitian Moh. Faizin (2019), menemukan bahwa UMP memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia [20].

5. Kesimpulan

IPM mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap upah minimum. Hal ini memberikan arti jika IPM meningkat maka upah minimum akan mengalami peningkatan juga. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif serta signifikan terhadap upah minimum. Memberikan arti jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka upah minimum akan menurun. Secara bersamaan IPM serta pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum. Hasil uji koefisien determinasi R^2 didapati 89% variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi yang ada pada variabel bebas dengan model statistik, sedangkan 11% dijelaskan oleh faktor diluar model.

Daftar Rujukan

- [1] Japany, A. M., & Firnanda, A. (2022). Analisis Spasial Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 dengan Model SAR-RE. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 731–740. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1135>
- [2] Daniel Collyn Damanik, & Rika Suriyanto Zalukhu. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 38–51. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.119>

- [3] Teguh Ali Fikri, Y. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107–116. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.59>
- [4] Parluhutan, P., Junaidi, J., & Prihanto, P. H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(3), 133–140. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i3.20>
- [5] Husada, A. P., & Yuhan, R. J. (2022). Direct dan Indirect Effect: Determinan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 98–116. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.06>
- [6] Wahyudi, H. (2019). Sistem Bagi Hasil Mudharabah Sebagai Mekanisme Self Regulating terhadap Kenaikan Upah Minimum Regional Pada UMKM Puti Minang Group (PtM). *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 184. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10089>
- [7] Lestari, F. Y., Affandi, M. I., & Ismono, R. H. (2023). Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung Tahun 2012-2020. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 456. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.60132>
- [8] Himannudin, F., Marselina, M., Ratih, A., & Murwiati, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Bruto di Asia Tenggara. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.26905/jrei.v3i2.8452>
- [9] Anggarini, D. R. (2021). Dampak Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 7(2), 116–122. <https://doi.org/10.30873/jbd.v7i2.3089>
- [10] Aida, N., Afif, F. Y., & Peni, T. S. (2021). Krisis Global dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 46–55. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i1.214>
- [11] Marina, F., Nathália, L., Carlos, A. B., Luiz, E. G., & Rafael, G. (2021). Efficiency wage and work effort: Case study of a Brazilian multinational company. *African Journal of Business Management*, 15(1), 13–25. <https://doi.org/10.5897/ajbm2020.9088>
- [12] Mukaromah, L., Hanifatuzzahra, Z., Nasrullah, A., Latifah, T. M., Purwaningsih, V. T., & Suparta, I. W. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022. *Analisis*, 13(2), 228–245. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2874>
- [13] Dahliah, D., & Nirwana Nur, A. (2021). The Influence of Unemployment, Human Development Index and Gross Domestic Product on Poverty level. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 1(2), 95–108. <https://doi.org/10.52970/grsse.v1i2.84>
- [14] Najiya, N., & Diah Anggeraini Hasri. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 150–157. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2107>
- [15] Wiraja, A., & Marwan, M. (2023). Inflasi, Upah Minimum Regional dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Daya Serap Tenaga Kerja. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 580–585. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i2.585>
- [16] Aisyaturridho, Ahmad Albar Tanjung, & Weni Hawariyuni. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 114–126. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.3945>
- [17] Syahputra, A., Erfit, E., & Nurhayani, N. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 95–106. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i2.8323>
- [18] Husniah, Saharuddin, Anwar, K., & Juliansyah, H. (2022). Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(2), 110–116. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i2.10323>
- [19] Primadila, B., & Asmara, K. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Banjarmasin. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(1), 30. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v19i1.8003>
- [20] Faizin, M. (2019). Analisis Dampak Upah Minimum Dan Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v3i1.1339>